

EVALUASI PENGAWASAN KREDIT MODAL KERJA GUNA MENEKAN TUNGGAKAN KREDIT (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang)

ANANDHIKA MEGA PRATAMA

Sri Mangesti Rahayu

Zahroh Z.A

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

Email : anandhika.pratama@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to find out credit monitoring which is carried out on the bank loans granted to customers so doesn't become delinquent credit. Supervision is carried out by a bank is one of the main factors that can prevent delinquent loans by customer. Type of research is a descriptive study with qualitative research methods . The focus of this research is surveillance of working capital credit monitored by credit monitoring techniques and analysis of working capital loans which start from 2010 till 2012 based on outstanding loans .

From these results, found that the implementation of credit control ran in accordance with the credit control techniques but the level of Non Performing Loan increased each year, although still below standard 5% based on Bank Indonesia. Non Performing Loan in 2010 which amounted to 2.86% , 3,05% in 2011, 3,75% in 2012.

Weaknesses caused by On The Spot inspections which are only done when clients start arrears, shortage of account officer and customer development activities need to be done frequently .

Based on weaknesses, the writer suggest to increased the additional numbers of account officer, and increasing frequency of visits to customers and make good communication between bank and customer.

Keyword : account officer, monitoring credit techniques, on the spot inspection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan pada kredit yang diberikan bank kepada nasabah agar tidak menjadi tunggakan kredit. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank merupakan salah satu faktor utama yang bisa mencegah tunggakan kredit oleh debitur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah pengawasan kredit modal kerja dilihat dari teknik pengawasan kredit serta analisis tunggakan kredit modal kerja selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan kredit yang disalurkan. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan kredit telah berjalan sesuai dengan teknik pengawasan kredit namun tingkat *Non Performing Loan* setiap tahun meningkat meskipun tetap dibawah standard Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2010 sebesar 2,86%, tahun 2011 meningkat menjadi 3,05% kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 3,75%. Kelemahan yang menyebabkan peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) yaitu kegiatan inspeksi *On The Spot* hanya dilakukan saat nasabah mulai menunggak, *Account Officer* jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah nasabah, serta kegiatan pembinaan nasabah yang perlu dilakukan lebih sering. Kelemahan – kelemahan yang ditemukan, disarankan penambahan tenaga *Account Officer* yang didukung oleh ketrampilan yang kompeten serta peningkatan frekuensi kunjungan terhadap nasabah sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pihak bank dan pihak nasabah.

Kata Kunci : account officer, teknik pengawasan kredit, inspeksi on the spot

PENDAHULUAN

Peran perbankan dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara sangat besar. Hal ini dikarenakan semua transaksi keuangan menggunakan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas keuangan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga, tidak dapat dilepaskan dari dunia perbankan. Terdapat suatu anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara.

Sebagai salah satu upaya pengamanan fasilitas kredit, bank melakukan pengawasan terhadap kredit yang dijalankan kepada nasabah. Pengawasan dilakukan secara seksama baik secara keseluruhan maupun secara individual. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam usaha perkreditan.

Pengawasan kredit merupakan salah satu cara bank dalam menjaga agar kredit yang disalurkan kepada nasabah tepat aman. Tunggakan kredit yang terjadi pada bank dapat disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan fungsi pengawasan kredit oleh bank selaku pemberi kredit.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Bank merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang berhubungan erat dengan bidang keuangan. Seperti lembaga keuangan lainnya, bank juga menyediakan berbagai bentuk jasa keuangan. Lembaga perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pengertian bank menurut Kasmir (2012:03) adalah Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dan memberikan jasa bank lainnya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Selanjutnya pengertian bank menurut Hasibuan (2004:03) adalah :

“Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian”

Kemudian pengertian lain dari bank menurut Undang – undang RI no 10 tahun 1998 , bank adalah “ badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

B. Pengertian Kredit

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang harus disepakati. (Hasibuan, 2004:87)

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Perbankan no 10 tahun 1998 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dari pengertian – pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kredit adalah kegiatan penyediaan uang dari pihak pemberi kepada pihak penerima yang akan menimbulkan tagihan di pihak penerima, dengan perjanjian dan jangka waktu tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak.

1. Unsur – Unsur Kredit

Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2012:114) :

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka Waktu
- d. Resiko
- e. Balas jasa

2. Jenis – Jenis Kredit

Jenis jenis kredit menurut Kasmir,(2012:120) :

- a. Kredit investasi
- b. Kredit modal kerja
- c. Kredit produktif
- d. Kredit konsumtif
- e. Kredit perdagangan
- f. Kredit jangka pendek
- g. Kredit jangka menengah
- h. Kredit jangka panjang
- i. Kredit dengan jaminan
- j. Kredit tanpa jaminan
- k. Kredit pertanian
- l. Kredit peternakan
- m. Kredit pendidikan
- n. Kredit perumahan

C. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam kegiatan operasionalnya. Contoh kredit modal kerja digunakan untuk pembelian bahan – bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan (Kasmir, 2002:77). Kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tujuan kredit untuk meningkatkan produksi baik kualitatif maupun kuantitatif (Suyatno, 2004:28).

Adapun penggolongan kredit modal kerja adalah sebagai berikut :

1. Golongan I dengan suku bunga 9%/ tahun, adalah kredit modal kerja untuk pengadaan dan penyaluran beras / gabah/ padi/ jagung untuk BUUD / KUD.
2. Golongan II dengan suku bunga 12% / tahun diperuntukkan untuk :
 - a. Kredit untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka bimnas dan inmas.
 - b. Kredit pengumpulan dan penyaluran garam rakyat oleh BUUD/KUD dan PIN. Garam serta kredit modal kerja PT. Garam.
 - c. Kredit modal kerja pabrik terigu.
 - d. Kredit dan ekspor produsen eksportir.
 - e. Kredit produksi, impor, dan penyaluran pupuk dan obat hama.
 - f. Kredit impor dan penyaluran barang – barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri.
 - g. Kredit modal kerja untuk pengumpulan dan penyaluran kredit modal kerja.
 - h. Kredit modal kerja usaha pertanian dan kerajinan rakyat.
 - i. Kredit modal kerja untuk pertanian dan perunggasan rakyat.
3. Golongan III dengan suku bunga 13,5%/tahun diperuntukkan bagi :
 - a. Kredit modal kerja untuk industri dan jasa-jasa.
 - b. Kredit modal kerja untuk produksi lainnya.
 - c. Kredit impor dan penyaluran barang – barang yang diawasi.
 - d. Kredit untuk pembiayaan persediaan gula.
 - e. Kredit perdagangan dalam negeri termasuk perdagangan antar pulau.
 - f. Kredit modal kerja untuk kontraktor proyek DIK, INPRES yang dibiayai dengan

anggaran pemerintah daerah serta perumahan sederhana.

4. Golongan IV dengan suku bunga 15%/tahun diperuntukkan bagi kontraktor diluar proyek yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
5. Golongan V dengan suku bunga 18%/tahun diperuntukkan bagi kredit impor dan penyaluran barang – barang impor yang tidak termasuk dalam bantuan luar negeri. (Suyatno, 2004:28)

D. Prinsip Penilaian Kredit

Dalam memberikan suatu kredit kepada nasabah, bank harus merasa yakin bahwa kredit tersebut akan benar – benar kembali kepada bank. Keyakinan bahwa nasabah tersebut akan mengembalikan kredit diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya.

Penilaian terhadap nasabah dapat dilakukan dengan penilaian kriteria – kriteria serta aspek – aspek yang sudah menjadi standard bank. Biasanya kriteria penilaian umum yang harus dilakukan bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar layak untuk diberikan kredit dapat dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Disamping menggunakan prinsip 5C dan 7P , prinsip-prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Aspek - aspek yang dinilai adalah :

- a. Aspek yuridis/hukum
- b. Aspek pasar dan pemasaran
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek teknis/operasi
- e. Aspek manajemen
- f. Aspek sosial dan ekonomi
- g. Aspek amdal

E. Pengawasan Kredit

Untuk mengamankan fasilitas kredit yang dikucurkan, bank senantiasa melakukan pengawasan terhadap nasabah baik secara keseluruhan maupun secara individual per nasabah, apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah diajukan atau tidak. “Pengawasan kredit adalah usaha – usaha untuk menjaga agar kredit tetap lancar, produktif, dan tidak macet” (Hasibuan, 2006:105).

“Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya

penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi kredit yang benar”.(Arthesa, 2006:180),

“Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk pengamanan dan penjagaan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang efektif dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan – kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi kredit yang benar”. (Mulyono, 2001:460).

Dalam setiap kredit selalu terdapat resiko bahwa kredit tersebut tersebut berpotensi untuk menjadi kredit macet, maka bank perlu melakukan kegiatan pengawasan kredit. Kegiatan pengawasan kredit ini hendaknya dilakukan oleh pihak bank sejak masa awal pemberian kredit hingga kredit berakhir.

F. Teknik Pelaksanaan Pengawasan Kredit

“Teknik pengawasan kredit adalah pendekatan – pendekatan yang dipakai oleh manajemen bank dalam melakukan pengawasan kredit”(Muljono, 2001:472). Teknik pengawasan kredit dibagi menjadi :

- a. Verband Control
Kegiatan pemeriksaan atas suatu perkiraan – perkiraan saling berhubungan
- b. Pengawasan Fisik / Inspeksi On the Spot
Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di perusahaan / tempat usaha nasabah.
- c. Monitoring Perkreditan
Kegiatan monitoring secara intern dan ekstern bank terhadap kredit yang diajukan oleh debitur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2002:9), menjelaskan bahwa, pengertian dari penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi).”

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:9) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Fokus Penelitian

Penyusunan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi masalah – masalah yang akan diteliti di dalam penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah :

- a. Pengawasan kredit modal kerja dilihat dari teknik pelaksanaan pengawasan kredit.
- b. Analisis tunggakan kredit modal kerja (NPL) berdasarkan jumlah tunggakan kredit dibandingkan dengan jumlah kredit modal kerja yang disalurkan selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode :

- a. Wawancara
Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh suatu data atau informasi yang diinginkan dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak – pihak yang terkait dengan objek penelitian, yaitu pimpinan, bagian perkreditan, dan pengawasan.
- b. Dokumentasi
Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen perusahaan seperti profil perusahaan dan struktur organisasi, peraturan pemerintah.
- c. Observasi atau pengamatan
Adalah metode dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang hal – hal yang berkaitan dengan sistem dan pengawasan kredit.

Teknik Analisis

1. Menganalisis pengawasan kredit modal kerja
Menganalisis teknik pelaksanaan pengawasan kredit terhadap kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada nasabah serta pengawasan pada setiap tahap pemberian kredit modal kerja sehingga dapat diketahui sejauh

mana pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja melalui :

- a. Inspeksi On The Spot
 - b. Pembinaan terhadap nasabah
 - c. Account Officer
2. Menganalisis tunggakan kredit modal kerja berupa:
- a. Analisis jumlah debitur yang mengajukan kredit modal kerja
 - b. Jumlah kredit modal kerja yang disalurkan
 - c. Jumlah tunggakan kredit modal kerja (NPL) berdasarkan jumlah kredit modal kerja yang disalurkan kepada nasabah.
3. Menganalisis kekurangan – kekurangan yang ditemukan dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang ditemukan pada sistem pengawasan kredit modal kerja yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan pengawasan kredit yang lebih baik.

PEMBAHASAN

Prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk kantor unit Tanjungrejo kota Malang

Sebelum kredit modal kerja diberikan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan, terdapat prosedur – prosedur yang harus dilakukan dan dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- a. *Customer service* menerima berkas – berkas pengajuan kredit modal kerja dari calon debitur sesuai persyaratan administrasi yang telah ditentukan, yaitu :
 - 1) Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 lembar. Apabila calon debitur sudah menikah, maka harus menyerahkan fotocopy KTP suami dan istri yang masih berlaku.
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
 - 3) Surat keterangan usaha (SKU) dari desa atau kelurahan atau fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan).
 - 4) Agunan yang akan dijaminkan, seperti sertifikat tanah, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan lain – lain.
- b. *Customer service* memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas – berkas yang dibawa oleh calon debitur dan menyiapkan formulir pengajuan pinjaman, kemudian *customer service* mengisikan data calon debitur pada formulir pengajuan pinjaman.
- c. *Customer service* meminta SID (Sistem Informasi Debitur) pada Bank Indonesia

secara online atau *BI checking*. *BI Checking* kemudian akan diperiksa oleh *Costumer Service* guna mengetahui apakah calon debitur tersebut mempunyai pinjaman di bank lain atau kredit kendaraan bermotor. Apabila terdapat pinjaman di bank lain atau debitur tersebut memiliki kredit kendaraan bermotor, maka pengajuan kreditnya ditolak dan dokumen persyaratan administrasi yang telah disetorkan oleh debitur berupa fotokopi KK, fotokopi KTP, SKU, dan agunan/jaminan akan dikembalikan. Bagi calon debitur yang tidak memiliki kewajiban kredit di bank lain atau kredit kendaraan bermotor, maka pengajuan kreditnya akan diproses lebih lanjut. Calon debitur kemudian menandatangani formulir pengajuan pinjaman yang telah diisikan data dirinya oleh *Customer service* sebelumnya.

- d. Berkas SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) milik calon debitur tersebut kemudian dicatat di register SKPP tanggal pengajuan kreditnya dan diberi nomor pangkal.
- e. *Customer service* menyerahkan berkas SKPP kepada Kepala Unit untuk diperiksa kelengkapannya dan ditindaklanjuti.
- f. Berkas SKPP yang telah diberi nomor pangkal tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk diperiksa kelengkapannya. Kemudian Kepala Unit memberikan disposisi pada berkas SKPP. Berkas SKPP yang telah didisposisi diserahkan kembali pada *customer service*.
- g. *Customer service* menerima kembali berkas SKPP yang telah diperiksa dan didisposisi oleh Kepala Unit, selanjutnya *customer service* mencatat tanggal disposisi di buku register SKPP.
- h. Kemudian *Customer service* segera menyiapkan formulir laporan penilaian jaminan, formulir laporan penilaian hasil pemeriksaan di lapangan.
- i. Formulir laporan penilaian jaminan, formulir laporan penilaian hasil pemeriksaan di lapangan dan berkas SKPP yang telah didisposisi oleh Kepala Unit kemudian diserahkan kepada *Account Officer* untuk kunjungan ke tempat nasabah (*Inspeksi On The Spot*).
- j. *Account Officer* menandatangani register penyerahan SKPP sebagai tanda terima dari

Customer service. Apabila berkas SKPP yang akan diperiksa lebih dari satu, maka SKPP disusun berurutan sesuai dengan wilayah atau tempat yang akan dikunjungi, sehingga mudah ditemukan saat dilakukan kunjungan *On The Spot*.

- k. Setelah *Account Officer* menerima dan memeriksa kembali kelengkapan berkas SKPP dari *customer service*, maka berdasarkan disposisi Kepala Unit, *Account Officer* akan melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur

Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja

Pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang pada umumnya sesuai dengan teknik pengawasan yang berlaku di dalam dunia perbankan dalam usahanya memperkecil tunggakan kredit. Namun dalam praktek di lapangan, penerapan teknik tersebut berjalan kurang optimal dalam menekan tunggakan - kredit yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang. Kekurangan – kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan pengawasan kredit yang selama ini dilakukan adalah :

- a. Inspeksi On The Spot

Inspeksi On The Spot dilakukan apabila kredit dikururkan sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit. Karena salah satu langkah dalam prosedur pemberian kredit adalah adanya inspeksi atau penilaian yang harus dilakukan oleh *Account Officer* (AO). Dalam hal ini pelaksanaan Inspeksi On The Spot atau kunjungan langsung ke tempat usaha / tinggal debitur hanya dilakukan sesekali dan tidak teratur. Dalam prakteknya sebagian besar kunjungan ke tempat debitur hanya dilakukan apabila terdapat tunggakan kredit modal kerja terhadap debitur yang bersangkutan. Inspeksi On The Spot sebaiknya dilakukan sedikitnya satu bulan sekali dan tanggal kunjungan berganti – ganti tiap bulan. Dengan pelaksanaan kunjungan yang berpola seperti ini maka bank akan mendapatkan informasi terbaru mengenai usaha nasabah dan keadaan usaha nasabah sehingga apabila terdapat masalah tunggakan kredit bank dapat mengambil tindakan pembinaan lebih awal.

- b. Pembinaan terhadap nasabah

Pembinaan terhadap nasabah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja yang dilakukan oleh pihak bank guna memberikan pembinaan kepada debitur yang mendapatkan kredit modal kerja dari bank. Sejauh ini pembinaan terhadap nasabah hanya dilakukan saat nasabah mulai mengalami masalah dalam pengembalian kredit, yaitu saat nasabah mulai membuat tunggakan dalam kredit yang ditanggungnya. Pembinaan terhadap debitur hendaknya dilakukan lebih awal dan terprogram. Seharusnya pembinaan terhadap debitur dilakukan sejak awal pemberian kredit sehingga apabila debitur mulai menunjukkan kesulitan dalam mengembalikan angsuran kreditnya maka pihak bank dapat segera mengetahui dan melakukan pembinaan terhadap nasabah tersebut dan juga memberikan saran – saran atau masukan – masukan terhadap usaha debitur sehingga usaha mereka dapat lebih maju dan memperlancar pengembalian kredit nasabah tersebut.

- c. *Account Officer* (AO)

Account Officer memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pemberian kredit karena *Account Officer* (AO) merupakan petugas bank yang melakukan kunjungan ke tempat nasabah dan memberikan penilaian terhadap layak atau tidaknya debitur tersebut menerima kredit. Pemilihan *Account Officer* yang baik dan kompeten dalam melayani nasabah sangat diperlukan, karena *Account Officer* sendiri memiliki peran yang dominan pada saat debitur melakukan pengajuan kredit, pencairan kredit, serta saat pelunasan kredit, *Account Officer* selalu terlibat di dalamnya yaitu membina dan mengawasi debitur – debitur yang menerima kredit. Perlunya dilakukan penambahan jumlah *Account Officer* karena tidak sebanding dengan banyaknya debitur yang ditangani setiap tahun, agar proses perkreditan berjalan lebih lancar dan efisien.

Account Officer hendaknya juga lebih sering melakukan pembinaan terhadap debitur – debitur yang dibinanya sehingga apabila debitur mengalami kesulitan dalam melunasi angsurannya, maka

Account Officer dapat segera mencari solusi yang baik

2. Analisis Tunggakan Kredit Modal Kerja

Pengawasan terhadap kredit modal kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Kota Malang dalam pelaksanaannya di lapangan belum dilaksanakan secara maksimal karena tunggakan kredit modal kerja masih tergolong tinggi walaupun di bawah standard NPL (Non Performing Loan) yang diperbolehkan Bank Indonesia sebesar 5%, namun kecenderungannya tunggakan kredit modal kerja yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun pada dasarnya tunggakan kredit merupakan salah satu resiko dari bank saat memberikan kredit, namun bank harus tetap mengelolanya agar tidak terlalu membebani kesehatan bank tersebut dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo.

Faktor – Faktor penyebab tunggakan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang adalah sebagai berikut :

a. Dari sisi Debitur, antara lain :

- 1) Itikad tidak baik dari debitur misalnya debitur yang sengaja tidak membayar cicilan kredit yang dibebankan kepadanya sehingga terjadi tunggakan kredit.
- 2) Menurunnya usaha debitur sehingga kemampuannya dalam membayar angsuran turut berkurang misalnya usaha yang merupakan mata pencaharian utama debitur mengalami penurunan omset ataupun mengalami kebangkrutan sehingga tidak ada / kurangnya pemasukan untuk membayar tunggakan kredit.
- 3) Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan dengan baik yaitu debitur dalam melakukan pengelolaan usaha kurang terarah sehingga usaha yang dikembangkan mengalami kemunduran dan berdampak pada berkurangnya keuntungan yang diperoleh dan kemampuan dalam membayar tunggakan kredit.
- 4) Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula misalnya pada saat pengajuan kredit untuk kepentingan usaha namun pada prakteknya debitur menggunakan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif misalnya membeli kendaraan pribadi sehingga penggunaan kredit yang tidak tepat sasaran ini mengakibatkan

debitur kesulitan mengangsur tunggakan kredit dikarenakan pemasukan berkurang.

b. Sisi Intern BRI Unit :

- 1) Itikad tidak baik dari petugas BRI misalnya adanya kerjasama antara debitur dan petugas BRI agar kredit yang diajukan tetap diterima walaupun sebenarnya debitur tersebut tidak layak menerima kredit tersebut dan sebagai imbalannya petugas BRI tersebut mendapatkan sejumlah imbalan.
- 2) Kekurangmampuan petugas BRI Unit dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pencairan kredit misalnya kurang jeli dalam menyimpulkan hasil survei ke tempat debitur sehingga hasil survei kurang tepat.
- 3) Kelemahan dan kurang efektifnya petugas BRI Unit dalam membina debitur misalnya pembinaan dan kunjungan terhadap debitur yang bermasalah hanya dilakukan sesekali sehingga debitur yang menunggak kredit dapat bertambah banyak.

c. Sisi Ekstern BRI Unit antara lain :

- 1) Perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan harga/biaya – biaya, dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap usaha yang digeluti debitur, misalnya apabila harga BBM naik maka biaya produksi naik sedangkan keuntungan yang diperoleh semakin menipis sehingga mengalami kerugian dan tidak ada pemasukan untuk membayar tunggakan kredit.
- 2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga debitur kehilangan sumber penghasilannya guna melunasi angsuran kreditnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang dilakukan mulai dari proses pemberian kredit hingga pelunasan kredit. Pengawasan kredit yang dilakukan mengandung unsur pengawasan ganda (melibatkan dua pejabat berbeda fungsi) dan pengawasan melekat (pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan) guna memperkecil resiko tunggakan kredit.

2. Kredit Modal Kerja yang terdapat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang digolongkan menjadi 5 kategori kolektabilitas yaitu Lancar (L), Kurang Lancar (KL), Dalam Pengawasan Khusus (DPK), Diragukan (D), Macet (M). Kategori kolektabilitas yang tergolong dalam tunggakan kredit adalah kolektabilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), serta Macet (M).
3. Presentase tunggakan kredit modal kerja yang terdapat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang selama 3 periode yaitu pada tahun 2010 sebesar 2,86 %, kemudian di tahun 2011 3,41%, selanjutnya di tahun 2012 3,62%. Peningkatan tunggakan kredit modal kerja terjadi setiap tahun, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana tunggakan kredit modal kerja meningkat sebesar 0,55% dari 2,86% menjadi 3,41 %. Sedangkan jenis kredit modal kerja yang memiliki jumlah tunggakan kredit tertinggi adalah kredit perdagangan.
4. Pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang telah berjalan dengan baik dan pada dasarnya telah sesuai dengan teknik pengawasan yang umumnya digunakan untuk memperkecil tunggakan kredit. Hal ini dapat dilihat dari NPL BRI dibawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5 % yaitu pada tahun 2,86% pada tahun 2010, 3,41% pada tahun 2011, dan 3,62% pada tahun 2012. Namun diharapkan bahwa jumlah NPL dapat diturunkan dari tahun ke tahun mengingat jumlah NPL terus naik dari tahun ke tahun meskipun masi dibawah batas normal.
5. Kegagalan debitur dalam mengelola usaha perdagangan dan pertanian seperti usaha yang mengalami kebangkrutan , kegagalan panen, serta kurang cakap dalam mengelola kredit yang diberikan merupakan salah satu penyebab utama dari terjadinya tunggakan dari kredit yang telah disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang.

Saran

1. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjungrejo Kota Malang hendaknya lebih ditingkatkan terutama frekuensi kunjungan yang dilakukan ke debitur Frekuensi kunjungan kepada debitur hendaknya dilakukan dua kali dalam satu bulan guna mempererat komunikasi antara pihak bank dengan debitur agar apabila debitur mengalami masalah yang berkaitan dengan kredit maka dapat segera diketahui dan mendapatkan solusi.
2. Penambahan tenaga di bagian *Account Officer* (AO) yang didukung oleh ketrampilan yang kompeten, sehingga dapat melakukan pelayanan seperti inspeksi on the spot dan kunjungan terhadap debitur dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Athesa, Ade. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia
- Hasibuan, Malayu. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perbankan bagi Bank Komersil*. Yogyakarta : BPFE.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suyatno, Thomas, dkk. 2004. *Dasar – Dasar Perkreditan*. Jakarta : Gramedia